



PARIWISATA

Pengusaha Keberatan Malioboro Bebas Kendaraan

YOGYAKARTA - Para pengusaha sekaligus pemilik toko di sepanjang Malioboro, Yogyakarta, yang tergabung dalam wadah Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), mengeluhkan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penataan kawasan Malioboro.

Penataan kawasan jantung kota tersebut dinilai mereka sepihak. Sebab, sejak awal para pengusaha di kawasan itu sama sekali tidak pernah diajak rembukan atau berdialog. Termasuk didalamnya kebijakan kendaraan bermesin tidak boleh melintas apalagi masuk Malioboro.

"Kami baru diajak rembukan ketika proyek itu mau dikerjakan. Termasuk rencana atau wacana kawasan Malioboro bebas kendaraan bermesin, kami juga tidak diajak rembukan," kata Ketua PPMAY, Sadana Mulyana pada wartawan, kemarin.

Sebenarnya banyak permasalahan di Malioboro. Masalah yang satu belum selesai sudah muncul yang baru. Misal dengan rencana ataupun wacana Malioboro bebas kendaraan bermotor, jelas ini menyulitkan mereka pulang atau hendak keluar dari rumahnya.

"Kalau Malioboro bebas kendaraan bermotor, terus kami mau parkir dimana. Masak mau pulang ke rumah sendiri susah," katanya. "Kami para pengusaha itu tinggal di atas toko, jadi bawah untuk toko lantai atas untuk tempat tinggal," tambah dia.

Selain itu juga pembiaran ribuan pedagang kaki lima (PKL) yang menutup akses toko mereka. Oleh karena itu, kebijakan akan membebaskan Malioboro dari kendaraan bermotor dinilai merugikan.

Gelar Dagangan

Menurutnya, para PKL menggelar dagangan melebihi batas aturan yang ada. Keberadaan mereka yang saat ini berjumlah lebih dari 3000, menyulitkan masyarakat masuk toko. Perbandingan antara jumlah PKL dengan toko juga beda jauh, jumlah toko hanya ada 200 toko.

Akibatnya, toko mereka jarang disambangi pembeli sehingga rugi sepanjang waktu. Bahkan penurunannya, menurut Sudana, hampir menyentuh 70 persen dibandingkan sebelum menjamurnya PKL pada medio akhir 1990-an.

Sementara terkait dengan rencana pemberlakuan area bebas kendaraan, PPMAY melihat hal itu akan merugikan semua pihak. Baik pedagang maupun pengunjung karena harus memarkir kendaraannya sangat jauh dari tempat yang dituju.

Terpisah Wakil Wali Kota Haryadi Suyuti menyatakan, bahwa Pemkot Yogyakarta sepenuhnya akan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan atas dasar suka atau tidak suka.

Sedangkan soal rencana pembebasan dari kendaraan bermotor, yang menurut rencana diujicobakan pada 18 Juni nanti, Haryadi minta para pengusaha bersabar dulu karena itu hanyalah uji coba.

"Ini hanya mencoba saja dan melihat ada permasalahan apa saja yang muncul saat kebijakan rute baru ini diberlakukan nantinya secara permanen. Perlu beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum diterapkan," ujar Walikota. (sgt-66)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005